

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

2021

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2022.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

Parigi, 09 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pangandaran	9
2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	13
3.3 Program dan Kegiatan	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB IV PENUTUP	19
PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jl. Raya Parigi, Karangbenda Telp/ Fax (0265) 7500518 Parigi 46393

Email : kominfo.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050 / 019. A / DKISP / 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

- 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 09 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
 33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 adalah untuk menjadi pedoman segenap *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU (n-2)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (tahun n-2) dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2020 untuk belanja langsung sebesar Rp 1.552.500.758,- pencapaian 92,89 % yang dijabarkan melalui 7 Program dan 33 kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada prinsipnya program pelayanan administrasi perkantoran sudah sesuai dengan program kegiatan dengan persentase fisik anggaran 81,29 % dengan anggaran Rp. 424.881.594,- dengan realisasi Rp. 345.418.138,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 93,48 % dengan anggaran sebesar Rp. 203.638.264,- dengan realisasi Rp. 190.376.384,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terlaksana dengan baik dengan persentase fisik anggaran 100 % dengan anggaran Rp. 83.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 83.200.000,-

4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 97,90 % dengan anggaran sebesar Rp. 752.298.900,- dengan realisasi Rp. 736.502.424,-

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 97,50 % dengan anggaran sebesar Rp. 70.130.000,- dengan realisasi Rp. 68.382.050,-

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada program pengembangan data/informasi/statistic daerah sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 952.000,- dengan realisasi Rp. 952.000,-

7. Program Keamanan Informasi dan Persandian

Pelaksanaan kegiatan pada program keamanan informasi dan persandian terlaksana dengan baik dengan presentasi fisik anggaran 100% dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dengan realisasi Rp. 17.400.000,-

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi. Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.
2. Penggunaan aplikasi memang rentang terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem

4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 97,90 % dengan anggaran sebesar Rp. 752.298.900,- dengan realisasi Rp. 736.502.424,-

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 97,50 % dengan anggaran sebesar Rp. 70.130.000,- dengan realisasi Rp. 68.382.050,-

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada program pengembangan data/informasi/statistic daerah sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggaran 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 952.000,- dengan realisasi Rp. 952.000,-

7. Program Keamanan Informasi dan Persandian

Pelaksanaan kegiatan pada program keamanan informasi dan persandian terlaksana dengan baik dengan presentasi fisik anggaran 100% dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,- dengan realisasi Rp. 17.400.000,-

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi. Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.
2. Penggunaan aplikasi memang rentang terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem

dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dapat diperlihatkan pada table T-C 31 tentang riview terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021.

Tabel T-C. 31 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang desa, musrenbang RKPD di Kecamatan maupun hasil musrenbang kabupaten diperoleh hasil bahwa untuk SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ada program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

**Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge based society*), Pengembangan *e-Procurement*, Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan *e-government*.

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi antar operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, pos, internet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

Melalui program ini pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun arah kebijakan provinsi dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah: Pembangunan aparatur pemerintah dan pelayanan sektor publik mencakup penerapan TIK untuk manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian integral dari inisiatif Jawa Barat *Cyber-Province*. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, inisiatif *E-procurement* perlu dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berkaitan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut, Diskominfo telah menyusun sejumlah program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang provinsi yang tertuang dalam rencana kegiatan 2014 beberapa diantaranya adalah: Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi

Situs Web Pemkab Pangandaran Pengelolaan dan Pengembangan *Hosting/Web Server* Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran *Cyber*, Penguatan dan pengelolaan Siaran Televisi, Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pengembangan Aplikasi Sistem *E-Procurement*, Penyediaan Bidding Room Trainer dan Layananan Pengguna LPSE, Pengembangan Aplikasi Program *E-Planning*, Pengembangan Aplikasi Program *E-Contract*, Pendampingan Implementasi Sistem *E-Proc*, Pengembangan *E-Business* Kabupaten Pangandaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pangandaran Tahun 2022, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi modern;
- c. Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi dan informasi untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Meningkatnya pemanfaat teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informasi.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan media komunikasi publik

- Pelayanan informasi publik
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

C. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektornik
 - Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas
 - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator perencanaan selama satu tahun pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan pokok yang mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan pns selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator keuangan selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

4. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator BMD selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator pendapatan selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa tenaga operator kepegawaian selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan belanja alat tulis kantor selama satu tahun;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang menyediakan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama satu tahun;
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama satu tahun;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan undangan merupakan kegiatan belanja langsung yang menyediakan kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar/majalah selama satu tahun;
12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD daerah ini merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pangandaran;
13. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir biaya sewa gedung kantor selama satu tahun;
14. Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya belanja materai dan paket pengiriman surat selama satu tahun;
15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya tagihan listrik dan internet selama satu tahun;
16. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir biaya jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi, makanan dan minuman kantor selama satu tahun;

17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendaraan, pajak kendaraan jabatan selama satu tahun;
18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendaraan, pajak kendaraan operasional selama satu tahun;
19. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya servis komputer, printer dan ac selama satu tahun;
20. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya pemeliharaan Gedung kantor selama satu tahun;
21. Pengelolaan media komunikasi publik merupakan kegiatan peliputan acara-acara penting atau event di Kabupaten Pangandaran;
22. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan penyusunan daftar informasi publik untuk seluruh skpd lingkup Kabupaten Pangandaran;
23. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas merupakan kegiatan yang mengakomodir biaya kerjasama dengan media;
24. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektornik merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya tenaga programmer selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
25. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator *command center* selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
26. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator senapati/persandian selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya dukungan dan peran aktif seluruh komponen kelembagaan akan sangat menentukan hasil capaian program dan kegiatan. Hasil capaian program dan kegiatan dimaksud selanjutnya akan diketahui dan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun pada periode akhir tahun. LAKIP tersebut merupakan media pertanggungjawaban untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Parigi, 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



JAJA NURUHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pambina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

[illegible]

[illegible]

1.24 per Share Based on the most recent annual meeting held February 2006 under the Capital Budgeting Committee's recommendation.



Tabel TC.31
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
 Kabupaten Pangandaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Ketrutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	91%	4,395,834,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	91%	4,774,821,288	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	DKSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	37,000,000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	DKSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	37,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Rikhter realisasi kinerja skpd	DKSP	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Rikhter realisasi kinerja skpd yang dilaksanakan	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Rikhter realisasi kinerja skpd	DKSP	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Rikhter realisasi kinerja skpd yang dilaksanakan	1 dokumen	1,500,000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ssn	DKSP	Jumlah ssn yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	21 Orang	2,880,000,000	Penyediaan gaji dan tunjangan ssn	DKSP	Jumlah ssn yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	21 Orang	2,880,000,000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	DKSP	Jumlah dokumen keuangan	3 Dokumen	37,000,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	DKSP	Jumlah dokumen keuangan	3 Dokumen	37,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	DKSP	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd dilaksanakan	1 Laporan	750,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	DKSP	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd dilaksanakan	1 Laporan	750,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	DKSP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd yang tersusun	1 Laporan	900,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	DKSP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd yang tersusun	1 Laporan	900,000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	DKSP	Jumlah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	2 Jenis	37,000,000	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	DKSP	Jumlah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	2 Jenis	37,000,000	
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	DKSP	Jumlah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	1 Laporan	27,100,000	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	DKSP	Jumlah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	1 Laporan	27,100,000	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	DKSP	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	3 Kegiatan	34,600,000	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	DKSP	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	3 Kegiatan	34,600,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5,880,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKSP	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5,880,000	

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Jenis	444,600,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Jenis	444,600,000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	DKSP	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis	11,170,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	DKSP	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis	10,800,000	
Penyediaan bahan logistik kantor	DKSP	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	4,170,000	Penyediaan bahan logistik kantor	DKSP	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	4,170,000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKSP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	18,730,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKSP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	18,250,000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKSP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	24,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKSP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	15,800,000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DKSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang diselenggarakan	24 Kegiatan	270,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DKSP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang diselenggarakan	24 Kegiatan	270,000,000	
Pengadaan mobil	DKSP	Jumlah mobil yang diadakan	5 Jenis	44,000,000	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	DKSP	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	191,957,288	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	DKSP	Jumlah penyediaan gedung kantor tiap tahun	1 unit	120,000,000	Pengadaan mobil	DKSP	Jumlah mobil yang diadakan	5 Jenis	44,000,000	
Penyediaan jasa surat menyurat	DKSP	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	40 Buah	8,800,000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	DKSP	Jumlah penyediaan gedung kantor tiap tahun	1 unit	120,000,000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Rekening	130,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	DKSP	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	40 Buah	8,800,000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DKSP	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Orang	175,464,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Rekening	130,000,000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinas jabatan	DKSP	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 Unit	114,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DKSP	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Orang	175,464,000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan asuransi kendaraan dinas operasional atau lapangan	DKSP	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan asuransi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	12,120,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinas jabatan	DKSP	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 Unit	114,000,000	

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DKSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	5 Unit	11,850,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	DKSP	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	40,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	3,900,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DKSP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	5 Unit	11,000,000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik	55%	3,033,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	10,000,000	
	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	DKSP	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dijalankan dengan baik, jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dijalankan dengan baik	6 Kebijakan	250,000,000	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik	55%	2,692,000,000	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	DKSP	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kominfo yang diindaklan/juti	35 Opini dan aspirasi	34,000,000	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	DKSP	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dijalankan dengan baik, jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dijalankan dengan baik	6 Kebijakan	250,000,000	
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	DKSP	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah yang diinformasikan kepada publik	2 Jenis	34,000,000	Monitoring opini dan aspirasi publik	DKSP	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kominfo yang diindaklan/juti	35 Opini dan aspirasi	34,000,000	
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	DKSP	Jumlah konten yang dipublikasikan	5 Konten	50,000,000	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	DKSP	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah yang diinformasikan kepada publik	2 Jenis	34,000,000	
	Pengelolaan media komunikasi publik	DKSP	Jumlah media online yang dikelola, jumlah reklame yang dikelola, jumlah sosial media yang dikelola, jumlah videotron yang dikelola	1 Media online, 2 reklame, 4 sosmed, 2 videotron	96,000,000	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	DKSP	Jumlah konten yang dipublikasikan	5 Konten	50,000,000	
	Pelayanan informasi publik	DKSP	Jumlah informasi publik yang diberitaskan ke publik	72 Informasi publik	58,000,000	Pengelolaan media komunikasi publik	DKSP	Jumlah media online yang dikelola, jumlah reklame yang dikelola, jumlah sosial media yang dikelola, jumlah videotron yang dikelola	1 Media online, 2 reklame, 4 sosmed, 2 videotron	96,000,000	
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	DKSP	Jumlah sdm komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	70 sdm	30,000,000	Pelayanan informasi publik	DKSP	Jumlah informasi publik yang diberitaskan ke publik	72 Informasi publik	58,000,000	
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	DKSP	Jumlah hubungan dengan media yang terjalin, jumlah hubungan masyarakat yang terjalin, jumlah kerjasama kemitraan komunitas yang terjalin	3 media, 2 Km, 8 kemitraan	3,200,000,000	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	DKSP	Jumlah sdm komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	70 sdm	30,000,000	

	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota	DOSP	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	12 Unit	100,000,000	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	DOSP	Jumlah hubungan dengan media yang terjalin, jumlah hubungan masyarakat yang terjalin, jumlah kerjasama kemitraan komunitas yang terjalin	3 media, 2 Km, 3 kemitraan	1,000,000,000	
3	Program Aplikasi Informatika		tingkat kematangan tata kelola apbe	3,1 Indeks	2,889,100,000	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah : Kabupaten/Kota	DOSP	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	12 Unit	100,000,000	
	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pengandaran	Jumlah domain yang berjalan, jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	1 Domain dan 25 Sub domain	42,000,000	Program Aplikasi Informatika		tingkat kematangan tata kelola apbe	3,1 Indeks	2,889,100,000	
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah opd yang terhubung ke jaringan intra pemerintah	3 OPD	1,030,000,000	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan	Kab. Pengandaran	Jumlah domain yang berjalan, jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	1 Domain dan 25 Sub domain	42,000,000	
	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis sistem elektronik	Kab. Pengandaran	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang disusun	1 Rencana Induk	560,000,000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah opd yang terhubung ke jaringan intra pemerintah	3 OPD	1,030,000,000	
	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah, jumlah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	7 Sistem dan 4 unit	250,000,000	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis sistem elektronik	Kab. Pengandaran	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang disusun	1 Rencana Induk	560,000,000	
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Pengandaran	Cakupan implementasi proses bisnis berbasis elektronik	10%	293,500,000	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah, jumlah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	7 Sistem dan 4 unit	250,000,000	
	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah sumber daya TIK yang dikelola	1 Sumber daya	713,600,000	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Pengandaran	Cakupan implementasi proses bisnis berbasis elektronik	10%	293,500,000	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Daerah		Persentase publikasi data statistik sektoral	55%	618,000,000	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Kab. Pengandaran	Jumlah sumber daya TIK yang dikelola	1 Sumber daya	713,600,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Pengandaran	Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD, jumlah pengumpulan dan pengolahan data, jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Kegiatan	200,000,000	Program Penyelenggaraan Statistik Daerah		Persentase publikasi data statistik sektoral	55%	618,000,000	
	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Kab. Pengandaran	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	150 SDM	58,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Pengandaran	Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD, jumlah pengumpulan dan pengolahan data, jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Kegiatan	200,000,000	

	Membangun metadata statistik sektoral	Kab. Pangandaran	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	3 Metadata	200,000,000	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	150 SDM	88,000,000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikelola	1 Aplikasi	150,000,000	Membangun metadata statistik sektoral	Kab. Pangandaran	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	3 Metadata	200,000,000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	20%	215,100,000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikelola	1 Aplikasi	150,000,000	
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	DKSP	Jumlah aplikasi yang diuji jumlah aplikasi yang bersertifikasi elektronik	1 aplikasi, 1 aplikasi	170,000,000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	20%	215,100,000	
	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	DKSP	Jumlah komunikasi sandi yang berjalan dengan baik	1 Saluran komunikasi sandi	45,100,000	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah	DKSP	Jumlah aplikasi yang diuji jumlah aplikasi yang bersertifikasi elektronik	1 aplikasi, 1 aplikasi	170,000,000	
						Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	DKSP	Jumlah komunikasi sandi yang berjalan dengan baik	1 Saluran komunikasi sandi	45,100,000	
	Jumlah				11,170,154,000	Jumlah				11,148,521,388	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian
 Kabupaten Pangandaran

JATA NURUL HUDA, ST, M Des, Piu
 Pangandaran, 17/7/2023
 NIP. 19770108 199803 1 002

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pengandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.25.2.21.01.0010 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.25.2.21.01.0010 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Rencana Tahun 2022														Prediksi Maju Rencana Tahun 2023		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tipek Utar	Target			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.315.421.288				10.792.227.478		
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WOTA						4.774.321.288				4.698.227.478		
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38.500.000				46.500.000		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	3 Dokumen	37.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			36.900.000		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan efektivitas realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	1 Dokumen	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1.700.000		
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.688.250.000				2.772.078.508		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	21 Orang	2.630.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2.735.000.000		
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengujian Vertikal Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	3 Dokumen	37.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			46.700.000		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	1 Laporan	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			825.000		
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	1 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			595.000		
2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						37.000.000				42.790.008		
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	7 Jenis	37.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			46.700.000		
2	16	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Keuangan Perangkat Daerah						27.100.800				28.530.000		
2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah		Jumlah pengeluaran retribusi yang dilaporkan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	1 Laporan	27.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			28.250.000		
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24.900.000				42.700.008		
2	16	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda	3 Kegiatan dan Laporan	24.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			40.700.000		
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						952.150.000				889.882.478		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pengandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.26.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.26.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.06.2.01.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERBANDUAN														
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebersihan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Urair	Tertar	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		5 Jenis		4.850.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				5.354.500
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Perlalatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		70 Jenis		606.000.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				246.980.978
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tingga		Jumlah peralatan rumah tingga yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		5 Jenis		10.300.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				6.470.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		5 Jenis		4.170.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				4.587.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan		Jumlah barang cetakan dan penggunaan yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		2 Jenis		18.250.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				9.880.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Kacaan dan Perumahan Perumahan		Jumlah bahan kacaan dan perumahan perumahan yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		1 Jenis		18.800.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				21.780.000
2.16.01.2.06.08	Pengelolaan Aspek Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi SKPD yang diterangkan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		24 Kegiatan dan Laporan		270.000.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				202.900.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah								155.957.288					428.480.880
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan								191.957.288	PENDAPKAS ASU DAERAS				280.000.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		5 Jenis		44.000.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				48.400.000
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan gedung kantor dan lain lainnya		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		1 Unit		120.000.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				130.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah								514.284.000					570.280.000
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Mempuat		Jumlah jasa surat mempuat yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		40 Surat		8.800.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				9.300.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa Konsultasi, Sumber Daya Manusia dan Lainnya		Jumlah jasa konsultasi, sumber daya manusia dan lainnya yang disediakan		Kab. Pengandaran, Parijs, Karangbenda		3 Kegiatan		330.000.000	PENDAPKAS ASU DAERAS				340.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.25.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDUAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.25.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDUAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prestasi Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keteraian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tingkat Ulang	Target	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		6 Orang		175.484.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			201.250.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								175.000.000				177.700.000
2.16.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		2 Unit		114.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			125.400.000
2.16.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		2 Unit		40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			33.800.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya		Jumlah perawatan dan mesin lainnya yang disediakan		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		5 Unit		11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			12.100.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		1 Unit		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			8.800.000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								2.652.000.000				2.949.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2.652.000.000				2.949.000.000
2.16.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1. Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang ditetapkan dengan baik 2. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang ditetapkan dengan baik		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		6 Kebijakan		250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			300.000.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kemitra yang disalurkan		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		25 Opini dan Aspirasi		34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			37.000.000
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penerapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diformasikan kepada publik		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		2 Jenis		34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			37.000.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Rencanan Media Komunikasi Publik		Jumlah konten yang diproduksi		Kab. Pangandaran, Pangl. Karangbenda		5 Konten		90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			80.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pengandaran
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Pembelian Mula Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Ulang	Target	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media online yang dikelola Jumlah iklan yang dikelola Jumlah sosial media yang dikelola Jumlah videotron yang dikelola		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		1 Media Online 2 Iklan 4 Sosial 2 Videotron		96.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				106.000.000
2.16.02.2.01.08	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Informasi publik yang diserahkan ke publik		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		72 Informasi Publik		38.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				54.000.000
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		70 Sdm		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				40.000.000
2.16.02.2.01.12	Penyeringgapan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas		Jumlah hubungan dengan media yang terjalin Jumlah hubungan Masyarakat yang terjalin Jumlah kerjasama komunitas karumtaka yang terjalin		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		3 Media 2 KM 3 karumtaka		2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.700.000.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		10 Unit		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				900.000.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								2.889.100.000					3.148.000.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.072.000.000					1.548.000.000
2.16.03.2.01.02	Pembuatan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah domain yang berjalan dengan baik Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		1 Domain 25 Sub domain		42.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				48.000.000
2.16.03.2.01.05	Penyediaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		8 OPD		1.040.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.500.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.817.100.000					1.600.000.000
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang diselesaikan		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		1 Rencana induk		340.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah aplikasi yang terintegrasi di pusat data pemerintahan daerah Jumlah server baik pemerintahan daerah yang di kelola		Kab. Pengandaran, Perigi, Karangbenda		7 Sistem 4 Unit		250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				500.000.000

Program dari Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prediksi Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Teknik Ukur	TARGET	
2.16.03.200.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi yang Dilaksanakan Jumlah implementasi Proses Bisnis Berbasis Elektronik		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		4 Sistem 10 Proses Bisnis		293.500.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			330.000.000	
2.16.03.200.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah sumber daya TIK yang di kelola		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		1 Sumber Daya		718.600.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			750.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								618.000.000				688.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								618.000.000				688.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								618.000.000				688.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1. Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD 2. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data 3. Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		1 Kegiatan		200.000.000	PENGAPKAS ASLI DAERAH			220.000.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		150 Sdm		68.000.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			75.000.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		3 Metadata		200.000.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			220.000.000	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		1 Aplikasi		150.000.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			150.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								218.100.000				270.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								218.100.000				270.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								170.000.000				200.000.000	
2.21.02.2.01.02	Relaksasi Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang di uji keamanannya Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		1 aplikasi 2 aplikasi		170.000.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			200.000.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sende Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								48.100.000				70.000.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sende Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah komunikasi sendi yang berjalan dengan baik		Kab. Pangandaran, Perigi, Karangbenda		1 Saluran komunikasi		48.100.000	PENDAPKAS ASLI DAERAH			70.000.000	
TOTAL									11.148.821.288				11.727.227.479	